Negotiating Islamic Civilization in Digital Media: A Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis of *Pesantren* in Indonesian Online News

Saefu Zaman[1*]; Royan Nur Fahmi[1]; Tri Amanat[1]

[1]Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, BRIN

saefu.zaman@brin.go.id

Abstract

This study examines the discursive construction of Islamic boarding schools (*pesantren*) in Indonesian online media, positioning language as a site of negotiation between historical tradition and contemporary social transformation. As deeply rooted Islamic educational institutions, *pesantren* function not only as sites of religious knowledge transmission but also as symbols of moral authority contested in the digital public sphere. Their representation in online media is therefore shaped by lexical choices, framing strategies, and patterns of representation reflecting tensions between tradition and modernity.

This study aims (1) to map linguistic patterns in media coverage of *pesantren* and (2) to identify representational strategies used in constructing their public image. It employs a *corpus-assisted critical discourse analysis* (CACDA) approach, using a corpus of online news articles from mainstream Indonesian media (2025–2026). Data were collected with BootCat and analyzed using AntConc, with findings interpreted through the frameworks of Fairclough and van Dijk.

The results reveal two parallel representational tendencies: *pesantren* are portrayed as custodians of Islamic heritage and moral authority, yet also associated with contemporary social issues through recurring lexical patterns. These linguistic choices, along with syntactic structures and actor representation, function as discursive strategies shaping public perception. The study concludes that online media actively construct meanings of *pesantren*, negotiating their position between civilizational continuity and contemporary social scrutiny.

Keywords: *pesantren*; critical discourse analysis; corpus linguistics; online media; representation; CACDA.

1. Latar Belakang

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan identitas sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Dalam perkembangan sejarahnya, pesantren dikenal sebagai pusat transmisi keilmuan Islam tradisional yang menekankan otoritas kiai, pengajaran kitab kuning, serta pembentukan moral dan spiritual santri. Namun, arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan modernisasi pendidikan telah mendorong pesantren memasuki ruang transformasi sosial yang semakin kompleks.

Modernitas menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pesantren. Di satu sisi, pesantren dituntut mempertahankan identitas tradisionalnya sebagai penjaga nilai-nilai Islam Nusantara. Di sisi lain, pesantren harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, pendidikan formal, media digital, ekonomi kreatif, hingga tuntutan kompetensi abad ke-21. Kondisi ini menjadikan pesantren sebagai arena negosiasi antara tradisi dan modernitas. Kajian mengenai transformasi pesantren menunjukkan bahwa modernisasi

tidak selalu menghilangkan identitas tradisional pesantren, melainkan menghasilkan bentuk hibriditas budaya dan pendidikan.

Dalam konteks masyarakat digital, media online memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap pesantren. Media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun representasi sosial melalui pilihan bahasa, framing, dan strategi diskursif tertentu. Dalam perspektif linguistik media, konstruksi wacana mengenai pesantren dapat dianalisis melalui Analisis Wacana Kritis (AWK). Pendekatan ini memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berkaitan erat dengan relasi kuasa dan ideologi.

Meskipun penelitian mengenai pesantren, media digital, dan modernitas telah cukup berkembang, kajian yang secara khusus menelaah konstruksi diskursif pesantren dalam media online Indonesia sebagai arena negosiasi antara tradisi dan modernitas masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek pendidikan, moderasi beragama, atau transformasi kelembagaan pesantren, bukan pada bagaimana media *online* membangun representasi pesantren melalui strategi bahasa dan praktik diskursif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana media online Indonesia mengonstruksi pesantren dalam tarik-menarik antara identitas tradisional dan tuntutan modernitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik media, studi Islam kontemporer, komunikasi digital, serta kajian wacana kritis di Indonesia.

2. Kerangka Teoretis

Penelitian tentang pesantren sudah cukup banyak dilakukan, khususnya terkait dengan pesantren era saat ini. Isu menarik pesantren yang banyak dikaji adalah kaitan pesantren

e-ISSN: 3025-1575

dengan relevanitas kehidupan dan pendidikan modern. Hal ini terkait dengan kekhawatiran orang tua yang akan memasukkan anak-anaknya ke pesantren, yakni apakah setelah lulus dari *mondok,* anak-anak mereka dapat bersaing dengan kehidupan global yang menuntut banyak kompetensi, selain kompetensi keagamaan.

Penelitian terkait pesantren yang selaras dengan penelitian ini adalah penelitian representasi pesantren di media massa, khususnya media *online*. Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa media online memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik melalui framing dan konstruksi wacana. Dalam konteks pesantren, media sering memproduksi representasi yang kompleks dan kontradiktif. Penelitian-penelitian tersebut umumnya melihat bagaimana pesantren saat ini digambarkan di media dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di pesantren yang diberitakan. Penelitian linguistik (wacana) dan media umum membicarakan topik pesantren.

Penelitian pertama terkait pesantren dan media dilakukan oleh Muhibbin dkk. (2025). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media arus utama di Indonesia sering mengonstruksi pesantren dalam relasi dengan isu radikalisme dan terorisme. Akibatnya, pesantren melakukan resistensi media melalui pembangunan media alternatif dan strategi komunikasi digital untuk mempertahankan identitas mereka. Sementara itu, penelitian Nissa Aurellia Putri dkk. (2025) mengenai *framing* "feodalisme" pesantren dalam program televisi menunjukkan bahwa media cenderung menggunakan strategi sensasionalisme dan polarisasi dalam merepresentasikan relasi kiai dan santri.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aqila Nur Rahmalia (2023). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pesantren modern mulai mengembangkan *cyber public relations* dan media internal digital sebagai strategi membangun citra kelembagaan di ruang publik digital. Selain itu, Fitri dan Nikmah (2022) dalam penelitiannya yang

e-ISSN: 3025-1575

berjudul "Strategy of Fadhlul Fadhlan Pesantren in Developing Media Literacy" menemukan bahwa pesantren juga mengembangkan literasi media sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Penelitian terakhir dilakukan oleh Anton Sulaiman dkk. (2023) menggunakan model AWK Fairclough untuk menganalisis kontra-narasi radikalisme di media NU Online. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media digital Islam menggunakan strategi bahasa tertentu untuk membangun legitimasi ideologis dan identitas keagamaan moderat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*/*CDA*) Norman Fairclough. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap konstruksi diskursif pesantren dalam media online Indonesia melalui analisis bahasa, ideologi, dan relasi kuasa dalam teks media (Fairclough, 1995).

Data penelitian berupa artikel berita tentang pesantren yang dipublikasikan di detik.com pada periode 2025–2026. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi *BootCaT* (*Bootstrapping Corpora and Terms from the Web*) untuk membangun korpus berita digital secara sistematis (Baroni & Bernardini, 2004). Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi "pesantren", "ponpes", "detik.com", "2025", dan "2026". Kata kunci tersebut dipilih secara netral agar data yang diperoleh tidak terfokus pada satu peristiwa tertentu sehingga representasi pesantren dapat terlihat lebih objektif. Berdasarkan proses pengumpulan data, diperoleh 31 artikel berita yang kemudian dijadikan korpus penelitian.

Analisis awal dilakukan menggunakan aplikasi AntConc untuk mengidentifikasi pola linguistik dalam korpus. Analisis meliputi *keyword analysis*, *Key Word in Context*

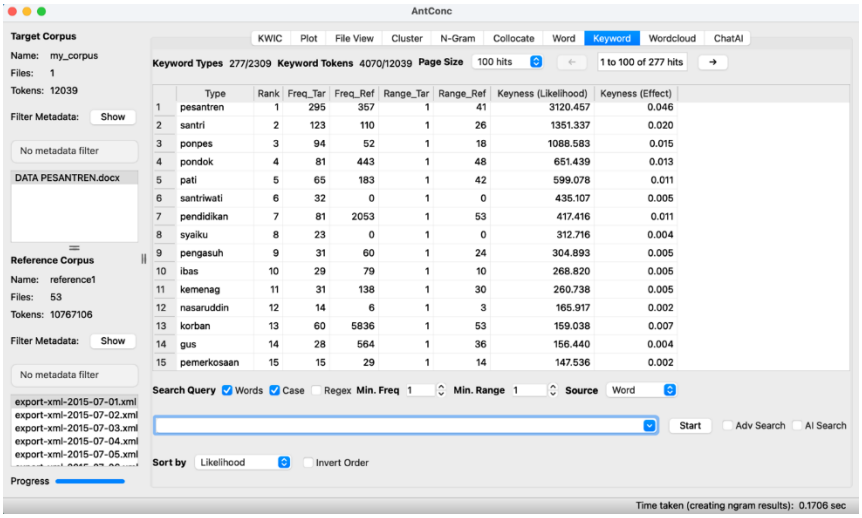
e-ISSN: 3025-1575

(KWIC), *concordance*, dan *collocation* guna menemukan kecenderungan representasi bahasa terhadap pesantren (Anthony, 2022). Hasil analisis korpus tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan model CDA Fairclough yang mencakup tiga dimensi, yaitu analisis teks (*text analysis*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*) (Fairclough, 2003). Validitas penelitian dilakukan melalui triangulasi teori dan verifikasi hasil analisis korpus dengan interpretasi wacana kritis sehingga interpretasi data lebih sistematis dan objektif.

4. Hasil Penelitian

Dasar analisis wacana pesantren pada penelitian ini didasarkan pada hasil analisis keyword terhadap data wacana pesantren di Indonesia pada tahun 2025—2026. Keyword dihasilkan dengan membandingkan *corpus target* dengan *corpus reference. Corpus target* merupakan korpus wacana pesantren yang peneliti peroleh dari Detik.com dengan jumlah token sebanyak 12.039 token, sedangkan *corpus reference* yang digunakan adalah corpus wacana media secara umum yang diperoleh dari Mendeley Data, yakni Indonesia News Corpus dengan jumlah token sebanyak 10.767.106 token (Rahutomo dan Miqdad, 2018).

Analisis data awal dilakukan dengan analisis *keyword*. *Keyword* merupakan kata-kata penting dalam sebuah korpus yang frekuensinya sangat tinggi (kata kunci positif) atau rendah (kata kunci negatif) (Scott, 2008). Berikut analisis *keyword* terhadap data korpus pesantren.



Gambar 1. Hasil *keyword* analysis data korpus

Dalam penelitian ini, saya menggunakan 25 *keyword* teratas sebagai bahan analisis. Kelima *keyword* tersebut secara umum dapat dikategorikan dalam 3 kelompok.

No.	Kategori	Kata
1.	Tempat	Pesantren, ponpes, pondok, Pati
2.	Aktor	Santri, santriwati, syaiku, pengasuh, Ibas, Kemenag, Nasarudin, korban, gus, ipul, menag, generasi, kiai
3.	Proses	Pendidikan
4.	Kejadian	Pemerkosaan, kekerasan, pencabulan,
5.	institusi	ptkin, PBNU,
6.	Agama	Agama, keagamaan

a. Analisis Keyword

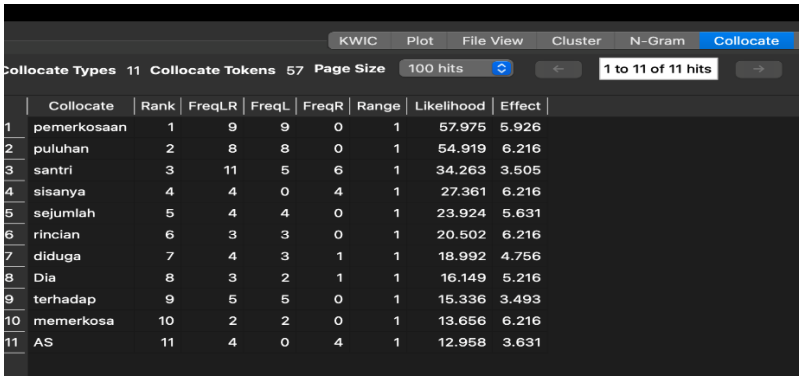
Analisis *keyword* terhadap 31 artikel berita *Detik.com* mengenai pesantren periode 2025–2026 menunjukkan adanya kecenderungan representasi tertentu dalam konstruksi wacana pesantren di media *online*. Berdasarkan hasil analisis korpus menggunakan AntConc, kata-kata dominan yang muncul dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu tempat, aktor, proses, kejadian, institusi, dan agama.

Pada kategori tempat, kata "pesantren", "ponpes", dan "pondok" muncul sebagai kata dominan yang menegaskan fokus utama pemberitaan pada institusi pendidikan Islam berbasis asrama. Kemunculan nama daerah seperti "Pati" menunjukkan bahwa pemberitaan pesantren dalam media *online* cenderung terhubung dengan lokus peristiwa tertentu yang memperoleh perhatian publik secara luas. Dominasi kata yang merujuk pada institusi dan lokasi memperlihatkan bahwa pesantren dikonstruksi sebagai ruang sosial yang tidak hanya berkaitan dengan pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai arena berbagai dinamika sosial kontemporer.

Dalam kategori aktor, ditemukan kata-kata seperti "santri", "santriwati", "pengasuh", "kiai", "gus", "menag", "Kemenag", dan "korban". Kehadiran kata "santri" dan "santriwati" menunjukkan bahwa media masih menempatkan peserta didik pesantren sebagai aktor utama dalam pemberitaan. Sementara itu, kata "pengasuh", "kiai", dan "gus" merepresentasikan otoritas tradisional pesantren yang memiliki posisi sentral dalam struktur sosial-keagamaan pesantren. Di sisi lain, kemunculan kata "korban" menunjukkan adanya kecenderungan pemberitaan yang berorientasi pada kasus atau konflik sosial tertentu. Kata-kata seperti "Menag", "Kemenag", "Ibas", "Ipul", dan "Nasarudin" memperlihatkan keterlibatan aktor negara dan elite politik dalam diskursus pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak lagi direpresentasikan semata

sebagai institusi pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari ruang politik, kebijakan publik, dan agenda nasional.

Salah satu permasalahan yang paling menonjol dalam penampilan aktor adalah penampilan aktor "santriwati". Kata "santriwati" dinyatakan dalam wacana media yang hampir selalu berkolokasi dengan kata-kata yang negatif.



	Collocate	Rank	FreqLR	FreqL	FreqR	Range	Likelihood	Effect
1	pemerkosaan	1	9	9	0	1	57.975	5.926
2	puluhan	2	8	8	0	1	54.919	6.216
3	santri	3	11	5	6	1	34.263	3.505
4	sisanya	4	4	0	4	1	27.361	6.216
5	sejumlah	5	4	4	0	1	23.924	5.631
6	rincian	6	3	3	0	1	20.502	6.216
7	diduga	7	4	3	1	1	18.992	4.756
8	Dia	8	3	2	1	1	16.149	5.216
9	terhadap	9	5	5	0	1	15.336	3.493
10	memerkosa	10	2	2	0	1	13.656	6.216
11	AS	11	4	0	4	1	12.958	3.631

Gambar 2. Kolokasi kata santriwati

Kolokasi kata "santriwati" tertinggi dengan kata pemerkosaan. Dari hal ini, seolah media ingin membangun kesepakatan bahwa santriwati merupakan sosok yang rentan menjadi korban di semua lingkungan. Hal ini tentu saja mengacu pada kasus terakhir di Pati yang begitu ramai. Namun demikian, hal ini—karena terus menerus diulang—tentu saja akan banyak menyebabkan kekhawatiran masyarakat untuk mengirimkan anak perempuannya ke pesantren.

Pada kategori proses, kata "pendidikan" menjadi salah satu kata dominan yang menunjukkan bahwa identitas utama pesantren dalam media tetap dikaitkan dengan fungsi edukatif dan pembentukan karakter keagamaan. Namun demikian, dominasi kategori kejadian seperti "pemerkosaan", "kekerasan", dan "pencabulan" menunjukkan adanya kecenderungan media dalam mengonstruksi pesantren melalui narasi kriminalitas

e-ISSN: 3025-1575

dan penyimpangan sosial. Kata-kata tersebut memperlihatkan bahwa isu kekerasan seksual menjadi salah satu fokus utama pemberitaan pesantren dalam periode penelitian.

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, dominasi leksikon bernuansa kriminalitas menunjukkan adanya proses seleksi diskursif yang dilakukan media dalam membangun realitas sosial mengenai pesantren. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk persepsi publik melalui pemilihan kata dan penonjolan isu tertentu. Intensitas kemunculan kata seperti "pemerkosaan", "kekerasan", dan "korban" berpotensi menghasilkan asosiasi negatif terhadap institusi pesantren secara umum.

b. Pesantren sebagai Interaksi Aktor dan Relasi Kuasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa detik.com masih merepresentasikan pesantren sebagai institusi keagamaan yang memiliki identitas khas melalui dominasi leksikon seperti "pesantren", "ponpes", "kiai", "santri", dan "keagamaan". Temuan ini sejalan dengan penelitian Dhofier yang menegaskan bahwa pesantren merupakan subkultur Islam Indonesia dengan karakter utama berupa relasi kiai-santri, tradisi kitab kuning, dan pembentukan moral keagamaan (Dhofier, 2011).

Representasi tersebut juga selaras dengan pengakuan negara terhadap pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam regulasi tersebut, pesantren diposisikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena negara secara formal mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sekaligus institusi yang memiliki kekhasan tradisional. Pasal 5 UU Pesantren menegaskan bahwa pesantren bertujuan membentuk individu yang unggul dalam ilmu

e-ISSN: 3025-1575

agama, berakhlak mulia, moderat, dan cinta tanah air. Dalam konteks ini, dominasi kata "agama" dan "keagamaan" dalam korpus pemberitaan memperlihatkan bahwa media masih mempertahankan citra pesantren sebagai lembaga moral dan religius.

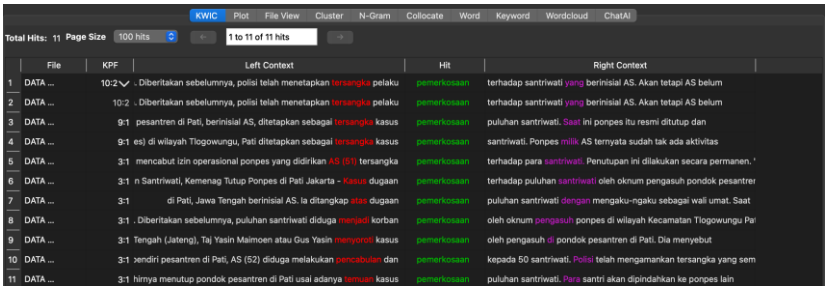
Selain relasi kuasa di atas, diskursus pesantren dibentuk melalui interaksi berbagai aktor, seperti santri, kiai, pengasuh, Kementerian Agama, elite politik, dan masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan Fairclough (2003) bahwa wacana media merupakan arena relasi kuasa yang melibatkan banyak kepentingan sosial dan institusional. Kehadiran kata "Kemenag" dan "Menag" menunjukkan kuatnya posisi negara dalam diskursus pesantren kontemporer. Negara tidak lagi sekadar menjadi regulator pendidikan Islam, tetapi juga aktor utama dalam pengawasan, standarisasi, dan perlindungan santri. Hal ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang memperkuat dukungan negara terhadap pengembangan pesantren melalui skema pendanaan nasional.

Keterlibatan negara dalam isu pesantren juga dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, pemberitaan media mengenai pesantren sering dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini memperluas definisi dan mekanisme penanganan kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan keagamaan. Kemunculan kata "korban" dalam korpus menunjukkan adanya pergeseran orientasi media menuju perspektif korban (*victim-centered discourse*). Sementara itu, representasi aktor seperti "kiai", "gus", dan "pengasuh" memperlihatkan bahwa otoritas tradisional pesantren masih memiliki posisi sentral. Akan tetapi, dalam media digital, otoritas tersebut tidak lagi bersifat absolut. Dalam perspektif sosiologi media, kondisi ini menunjukkan terjadinya transformasi otoritas keagamaan dari

otoritas berbasis kharisma menuju otoritas yang dinegosiasikan secara publik. Media digital memungkinkan masyarakat untuk mengkritik, mempertanyakan, bahkan mendekonstruksi legitimasi institusi keagamaan yang sebelumnya relatif tertutup.

c. Pesantren sebagai Peristiwa dan Logika Media Digital

Dominasi kata "pemerkosaan", "kekerasan", dan "pencabulan" menunjukkan bahwa pesantren dalam media online sering dikonstruksi melalui logika peristiwa (*event-oriented discourse*), khususnya peristiwa kriminal dan konflik sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa media digital cenderung menempatkan pesantren sebagai objek pemberitaan yang sensasional dan bernilai tinggi secara jurnalistik. Dalam teori media, peristiwa yang mengandung konflik, kriminalitas, dan tragedi memiliki *news value* tinggi karena dianggap mampu menarik perhatian audiens. Akibatnya, pemberitaan mengenai kekerasan seksual di pesantren memperoleh intensitas yang besar dibandingkan pemberitaan tentang pendidikan atau pengembangan keagamaan pesantren.



Gambar 3. KWIC kata pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan tindakan kriminal yang sangat dibenci karena juga berkaitan dengan kerusakan moral dan perusakan masa depan seseorang. Pemerkosaan tentu saja menjadi sebuah berita yang bernilai tinggi ketika terjadi di pesantren yang selama ini diyakini sebagai lembaga penanaman ilmu agama. Frekuensi yang sangat tinggi dari kata "pemerkosaan" ditambah lagi kata tersebut memiliki kolokasi tertinggi dengan kata

"santriwati" (lihat gambar 2) tentu saja dapat memantik persepsi baru akan entitas pondok pesantren. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Baker (2006) yang menyatakan bahwa analisis korpus dapat menunjukkan kecenderungan ideologis media melalui frekuensi dan kolokasi kata tertentu. Dalam penelitian ini, kolokasi antara kata "pesantren" dengan istilah kriminalitas menunjukkan adanya asosiasi diskursif yang berpotensi membentuk persepsi negatif publik terhadap institusi pesantren secara umum.

Meningkatnya pemberitaan mengenai kekerasan seksual di pesantren juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan regulasi nasional terkait perlindungan anak dan hak korban. Selain UU TPKS, pemberitaan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan tanggung jawab institusi pendidikan dalam menjamin keamanan dan perlindungan peserta didik. Dalam konteks praktik sosial Fairclough, media digital berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap institusi publik, termasuk pesantren. Dengan demikian, pemberitaan mengenai kekerasan di pesantren bukan hanya refleksi realitas sosial, tetapi juga bagian dari proses negosiasi nilai dalam masyarakat modern yang semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak individu.

Pada akhirnya, intensitas pemberitaan negatif juga berpotensi menghasilkan generalisasi dan stigma terhadap pesantren secara keseluruhan. Padahal secara empiris, pesantren di Indonesia sangat beragam baik dari segi tradisi, sistem pendidikan, maupun orientasi sosial-keagamaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media online memiliki peran strategis sekaligus problematis dalam membentuk citra pesantren di ruang publik digital.

5. Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa detik.com mengonstruksi pesantren melalui posisi diskursif yang beragam dan cenderung ambivalen. Berdasarkan hasil analisis *keyword* korpus, pesantren direpresentasikan tidak hanya sebagai institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial, negosiasi politik, dan kontroversi publik. Temuan ini memperkuat pandangan Fairclough (1995, 2003) bahwa wacana media berkaitan erat dengan konstruksi ideologi dan relasi kuasa dalam masyarakat.

Pertama, representasi pesantren sebagai entitas keagamaan terlihat melalui dominasi kata-kata seperti "pesantren", "ponpes", "pondok", "kiai", "santri", dan "keagamaan". Pola leksikal tersebut menunjukkan bahwa media masih memosisikan pesantren dalam kerangka identitas Islam dan otoritas tradisional. Temuan ini sejalan dengan pandangan Dhofier yang menyatakan bahwa pesantren merupakan subkultur Islam khas Indonesia yang ditandai oleh relasi kiai-santri, kehidupan komunal, dan tradisi pengajaran kitab klasik (Dhofier, 2011).

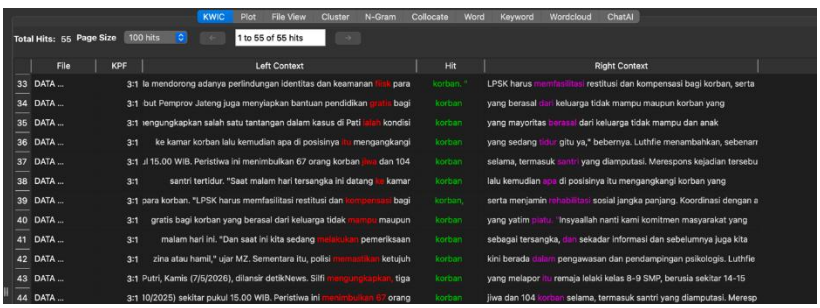
Representasi religius tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang secara formal mengakui pesantren sebagai institusi yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui regulasi tersebut, negara memperkuat legitimasi pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sekaligus menjaga kekhasan religius dan kulturalnya. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa identitas religius pesantren tidak direpresentasikan secara sepenuhnya ideal. Pesantren justru terus dinegosiasikan bersama isu modernitas, regulasi, dan akuntabilitas publik. Kondisi tersebut mendukung pandangan Latif (2019) yang menyatakan bahwa pesantren saat ini berada dalam proses negosiasi dengan modernitas. Pesantren tidak menolak perubahan sosial, tetapi berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan modern sambil mempertahankan identitas

e-ISSN: 3025-1575

tradisionalnya. Dalam konteks media digital, proses negosiasi tersebut menjadi semakin terlihat karena media membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas terhadap institusi keagamaan. Teori *mediatization of religion* dari Hjarvard (2011) menjelaskan bahwa media modern mengubah cara institusi agama direpresentasikan, dipahami, dan diperdebatkan dalam masyarakat kontemporer.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus pesantren dibangun melalui interaksi berbagai aktor sosial. Kemunculan kata-kata seperti "santri", "pengasuh", "kiai", "Kemenag", "Menag", dan beberapa tokoh politik menunjukkan bahwa pesantren tidak lagi direpresentasikan sebagai institusi keagamaan yang tertutup, melainkan sebagai entitas yang terhubung dengan jaringan sosial dan politik yang lebih luas. Kehadiran aktor negara seperti Kementerian Agama menunjukkan semakin kuatnya keterlibatan negara dalam urusan pesantren. Temuan ini berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur dukungan dan pengawasan negara terhadap pesantren melalui mekanisme pendanaan nasional. Dengan demikian, diskursus pesantren semakin berkaitan dengan isu tata kelola, regulasi, dan kebijakan publik.

Di sisi lain, kemunculan kata "korban" menunjukkan adanya pergeseran pemberitaan media menuju perspektif yang lebih berorientasi pada korban (*victim-centered discourse*).



Gambar 4. KWIC "korban"

Temuan ini penting karena memperlihatkan perubahan wacana publik di Indonesia terkait isu kekerasan, hak anak, dan akuntabilitas institusi pendidikan. Dominasi kosakata tersebut berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat perhatian publik terhadap perlindungan korban dan tanggung jawab institusi. Dalam perspektif CDA, kemunculan berbagai aktor tersebut menunjukkan perubahan relasi kuasa dalam diskursus pesantren. Otoritas tradisional yang sebelumnya dimiliki secara dominan oleh kiai dan pengasuh pesantren tidak lagi diposisikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipersoalkan. Media digital membuka ruang bagi kritik, negosiasi, dan evaluasi publik terhadap institusi pesantren. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhibbin dkk. (2025) yang menyatakan bahwa media digital mengubah relasi antara pesantren dan masyarakat karena pesantren kini berada dalam pengawasan publik yang berlangsung secara terus-menerus.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren dalam media online sering direpresentasikan melalui wacana berbasis peristiwa (*event-oriented discourse*), khususnya yang berkaitan dengan kriminalitas dan kekerasan seksual. Kata-kata seperti "pemerkosaan", "kekerasan", dan "pencabulan" mendominasi korpus dan menunjukkan bahwa media cenderung menonjolkan narasi yang sensasional dan berbasis konflik.

1	DATA ...	3:1	ıili apabila berhubungan dengan perempuan. Dilansir detikJatim, kasus	pencabulan	ini terjadi di sebuah lembaga pendidikan agama di kawasan
2	DATA ...	3:1	Seperti diketahui, pendiri pesantren di Pati, AS (52) diduga melakukan	pencabulan	dan pemerkosaan kepada 50 santriwati. Polisi telah mengamankan ters
3	DATA ...	3:1	berada di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Tindakan itu diplcu isu	pencabulan	yang terjadi di ponpes tersebut. Dilansir detikSumbagsel, Kabid Humas
4	DATA ...	3:1	korban yang sudah resmi melapor. "Jadi itu baru dugaan (17 korban	pencabulan),	karena kalau kami baru menerima laporan resmi dari tiga
5	DATA ...	3:1	ıt. Mereka (massa) menyatakan bahwa pimpinan ponpes ini melakukan	pencabulan,"	katanya, Minggu (10/5/2026). Lebih lanjut, kata Yuni, massa telah memt

Gambar 5. KWIC "pencabulan"

e-ISSN: 3025-1575

Dalam studi media, konflik dan kriminalitas memiliki nilai berita tinggi karena dianggap mampu menarik perhatian audiens dan meningkatkan keterlibatan pembaca di media digital. Akibatnya, pesantren menjadi sering diasosiasikan dengan peristiwa negatif dalam ruang publik. Baker (2006) menjelaskan bahwa analisis korpus dapat mengungkap kecenderungan ideologis media melalui pola frekuensi dan kolokasi kata tertentu. Dalam penelitian ini, kolokasi antara istilah pesantren dengan kosakata kekerasan berkontribusi dalam membentuk persepsi publik yang cenderung negatif terhadap institusi pesantren.

Kondisi media sekarang ini mungkin perlu dipahami dalam konteks perubahan sosial yang lebih luas. Meningkatnya pemberitaan mengenai kekerasan seksual menunjukkan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kelompok rentan di institusi pendidikan ataupun lembaga keagamaan. Dalam kerangka Fairclough (1995), media tidak sekadar merefleksikan realitas sosial, tetapi juga aktif membentuk nilai sosial dan legitimasi institusi.

6. Kesimpulan

Secara umum, analisis korpus menunjukkan bahwa detik.com mengonstruksi pesantren dalam posisi ambivalen: di satu sisi sebagai institusi pendidikan dan otoritas keagamaan tradisional, tetapi di sisi lain sebagai ruang sosial yang berkaitan dengan problem kekerasan, pengawasan negara, dan dinamika politik modern. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren dalam media online Indonesia diposisikan dalam tarik-menarik antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, pesantren tetap direpresentasikan sebagai institusi religius dan moral yang berakar pada tradisi Islam. Di sisi lain, pesantren juga menjadi objek regulasi negara, kritik publik, dan pengawasan digital yang semakin intensif. Representasi ganda tersebut memperlihatkan bagaimana media online menjadi

ruang negosiasi identitas keagamaan, otoritas institusi, dan nilai-nilai sosial kontemporer dalam masyarakat Indonesia.

Referensi

Anthony, L. (2022). *AntConc (Version 4.2.0) [Computer Software]*. Retrieved from AntConc Official Website. https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/

Baker, P. (2006). *Using Corpora in Discourse Analysis*. London, England: Continuum.

Baroni, M., & Bernardini, S. (2004). BootCaT: Bootstrapping corpora and terms from the web. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2004)* (pp. 1313–1316). Lisbon, Portugal: European Language Resources Association.

Basyit, A. (2017). "Pembaharuan Model Pesantren: Respon terhadap Modernitas." *Kordinat*, 16(2), 293–324.

Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.

Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.

Fitri, F., Fitri, A. N., & Ni'mah, N. (2022). "Strategy of Fadhlul Fadhlan Pesantren in Developing Media Literacy." *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*.

Hjarvard, S. (2011). The mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change. *Culture and Religion*, 12(2), 119–135. https://doi.org/10.1080/14755610.2011.579719

Latif, M. (2019). "Pergulatan Pesantren dengan Modernitas." *Al-Qalam*, 25(2).

McEnery, T., & Hardie, A. (2012). *Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Muhibbin, Choliq, A., & Wazis, K. (2025). "Pesantren and Media Imperialism." *Mediakita*.

Putri, N.A., dkk. (2025) Pembingkaian 'Feodalisme' Kiai dan Santri di Pesantren oleh Media Xpose Trans7: Analisis Wacana Kritis Fairclough. Scripta Humanika: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 1 No.2 2025 https://scriptaintelektual.com/scripta-humanika/index

Rahmalia, A.N. (2023). "Implementasi Cyber Public Relations pada Progresif Digital Media sebagai Media Internal Pondok Pesantren." *Jurnal Nomosleca*.

RAHUTOMO, F. & MIQDAD MUADZ MUZAD, AAD (2018), "Indonesian News Corpus", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/2zpbjs22k3.1

Sulaiman, A., Sauki, M., & Susanto, J. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap gerakan kontra narasi radikalisme di media NU Online. *Communicative*, 5(1), 45–60.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

e-ISSN: 3025-1575

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.